

RENJA 2024

PERENCANAAN & PELAPORAN

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran ALLAH SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa dan atas berkenaan-Nya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah dapat Menyelesaikan Penyusunan dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 mempunyai arti strategis karena di dalamnya memuat uraian program, kegiatan dan sub kegiatan.

Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya.

Rencana Kerja Tahun 2024 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis, dan Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Rencana Kerja sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun Anggaran 2024 serta untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Masohi, Desember 2023

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KABUPATEN
MALUKU TENGAH**



Drs. HENGKY TOMASOA, MA

NIP. 19691028 198902 1 002

ii
DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3 Maksud dan Tujuan	2
1.4 Sistematika	3
 BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	 6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	 6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	11
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	 12
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	14
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	16
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	 17
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	17
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	17
3.3. Program dan Kegiatan	18
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	 23
 BAB V PENUTUP	 27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun. Penyusunan RPJMD dilakukan secara terintegrasi dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya, mulai dari tingkat pusat dan provinsi. Hal ini dilakukan agar terdapat koordinasi dan sinkronisasi berbagai program/ kegiatan baik di pusat maupun di daerah dan pada akhirnya berbagai program pembangunan yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat di Kabupaten Maluku Tengah.

Penyusunan Rancangan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif. Dimana dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD.

Namun dengan mengacu pada evaluasi atas realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya, analisis kinerja pelayanan OPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat. Maka dapat ditetapkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika di Tahun 2024 yang akan datang.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Rancangan Renja OPD ini disusun berdasarkan undang-undang, peraturan serta ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 31 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2011-2031;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2022-2026;
18. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan susunan organisasi dan tata kerja dinas daerah Kabupaten Maluku Tengah;
19. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan OPD, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya alam pembangunan daerah.

Renja OPD Tahun 2024 dipergunakan pula sebagai tolak ukur kinerja aparat Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam

kurun waktu Tahun Anggaran 2024. Adapun Tujuan disusunnya renja tahun 2024 adalah untuk:

1. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan OPD.
2. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan.
3. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan kegiatan OPD yang perlu disampaikan kepada pemerintah daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja OPD ini, adalah dengan menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen, yang meliputi;

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/ kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah merupakan OPD baru yang disahkan melalui Perda No. 04 tahun 2016 yang sebelumnya merupakan Bidang pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Sebagai pelaksana urusan wajib bukan Pelayanan Dasar komunikasi dan informatika.

Evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Maluku Tengah s/d Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.1. sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Maluku Tengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Proram/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2026	Target Realisasi Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target Program /Kegiatan renja SKPD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program Keluaran Renstra SKPD Tahun 2023		Catatan
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.16.2.1 6.2.21.0 .00.01.0 000	Dinas Komunikasi dan Informatika											
2.16.2.1 6.2.21.0 .00.01.0 000.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Peningkatan Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	8	100	100	100	100	100	100	
2.16.2.1 6.2.21.0 .00.01.0 000.01. 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2.0	6.00	2.00	2.00	100	2.00	2.00	100	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Proram/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satua n	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangk at Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2026	Target Realisasi Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target Progra m /Kegiata n renja SKPD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program Keluaran Renstra SKPD Tahun 2023		Catatan
						Tar get	Realis asi	Ting kat Real isasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.16.2.1 6.2.21.0 .00.01.0 000.01. 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Dan evaluasi	Doku men	2.00	6.00	2.00	2.00	100	2.00	2.00	100	
2.16.2.1 6.2.21.0 .00.01.0 000.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/Lapor an administrasi keuangan perangkat daerah		2.0	8.00	2.0	2.0	100	2.0	2.0	100	
2.16.2.1 6.2.21.0 .00.01.0 000.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Oran g	38	152	38.0 0	38.00	100	29.00	29.00	100	
2.16.2.1 6.2.21.0 .00.01.0 000.01. 2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Doku men	1	12	1.00	1.00	100	1.00	1.00	100	
2.16.01.2 .03	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen/laporan barang milik daerah	Lapor an	1.00	4	1.00	1.00	100	1.00	1.00	100	
2.16.01.2 .03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Lapor an	1.00	4	1.00	1.00	100	1.00	1.00	100	
2.16.2.1 6.2.21.0 .00.01.0 000.01. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	0	0	1.00	1.00	100	1.00	1.00	100	
2.16.2.1 6.2.21.0 .00.01.0 000.01. 2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Doku men	0	4	1.00	1.00	100	1.00	1.00	100	
2.16.01.2 .05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Doku men	0	4	0	0	0	1.00	1.00	100	
2.16.2.1 6.2.21.0 .00.01.0 000.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
2.16.2.1 6.2.21.0 .00.01.0 000.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	54	8	1.00	1.00	100	2.00	2.00	100	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Proram/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satua n	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangk at Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2026	Target Realisasi Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target Progra m /kegiata n renja SKPD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program Keluaran Renstra SKPD Tahun 2023		Catatan
						Tar get	Realis asi	Ting kat Real isasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.16.2.1 6.2.21.0 .00.01.0 000.01. 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	4	1.00	1.00	100	1.00	1.00	100	
2.16.2.1 6.2.21.0 .00.01.0 000.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	4	1.00	1.00	100	1.00	1.00	100	
2.16.2.1 6.2.21.0 .00.01.0 000.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan	Doku men	5	4	1.00	1.00	100	1.00	1.00	100	
2.16.2.1 6.2.21.0 .00.01.0 000.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lapor an	5	4	1.00	1.00	100	1.00	1.00	100	
2.16.2.1 6.2.21.0 .00.01.0 000.01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	100	100	1.00	1.00	100	1.00	1.00	100	
2.16.2.1 6.2.21.0 .00.01.0 000.01. 2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5	4	1.00	1.00	100	0.00	0.00	0.00	
2.16.2.1 6.2.21.0 .00.01.0 000.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		15.00	12.00	100	100	100	100	100	100	
2.16.2.1 6.2.21.0 .00.01.0 000.01. 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lapor an	5.00	4.00	1.0 0	1.00	100	1.00	1.00	100	
2.16.2.1 6.2.21.0 .00.01.0 000.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lapor an	5.00	4.00	1.0 0	1.00	100	1.00	1.00	100	
2.16.2.1 6.2.21.0 .00.01.0 000.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lapor an	5.00	4.00	1.0 0	1.00	100	1.00	1.00	100	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Proram/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2026	Target Realisasi Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target Program /Kegiatan renja SKPD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program Keluaran Renstra SKPD Tahun 2023		Catatan
						Tar get	Realis asi	Ting kat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.16.2.1 6.2.21.0 .00.01.0 000.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara		5.00	4.00	1.00	1.00	100	1.00	1.00	100	
2.16.2.1 6.2.21.0 .00.01.0 000.01. 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5.00	4.00	1.00	1.00	100	1.00	1.00	100	
2.16.2.1 6.2.21.0 .00.01.0 000.01. 2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	45.00	12.00	24.00	24.00	100	4.00	4.00	100	
2.16.2.1 6.2.21.0 .00.01.0 000.02	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Presentase Publikasi Informasi Melalui Media Online	%	26.85	100.00	26.85	25.55	95.16	25.00	20.34	81.36	
2.16.2.1 6.2.21.0 .00.01.0 000.02. 2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		100	5.00	5.00	5.00	98.45	5.00	5.00	98.45	
2.16.2.1 6.2.21.0 .00.01.0 000.02. 2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi public	Dokumen	1	4	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	
2.16.2.1 6.2.21.0 .00.01.0 000.02. 2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Pengelolaan media komunikasi public	Dokumen	1	4	1.00	1.00	100	1.00	1.00	100	
2.16.2.1 6.2.21.0 .00.01.0 000.02. 2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah dokumen hasil Pelayanan informasi publik	Dokumen	1	4	1.00	1.00	100	1.00	1.00	100	
2.16.2.1 6.2.21.0 .00.01.0 000.02. 2.01.07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan hubungan media	Layanan	1	4	1.00	1.00	100	1.00	1.00	100	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Proram/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2026	Target Realisasi Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target Program /Kegiatan renja SKPD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program Keluaran Renstra SKPD Tahun 2023		Catatan
						Tar get	Realis asi	Ting kat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.16.2.1 6.2.21.0 .00.01.0 000.02. 2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah dokumen kemitraan dengan masyarakat media dan komunikasi dalam mendesiminas informasi program dan kegiatan	Doku men	5	4	1.00	1.00	100	0.00	0.00	0.00	
2.16.2.1 6.2.21.0 .00.01.0 000.03	Program Aplikasi Informatika	Presentase E-Government yang terintegrasi	%	27.40	98.33	27.40	26.92	98.25	55.82	100	95.91	
2.16.2.1 6.2.21.0 .00.01.0 000.03. 2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Lapo ran	100	8	2	2	100	2	2	100	
2.16.2.1 6.2.21.0 .00.01.0 000.03. 2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Doku men	1	4.00	1.00	1.00	100	1.00	1.00	96.15	
2.16.2.1 6.2.21.0 .00.01.0 000.03. 2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	1	4	1.00	1.00	100	1.00	1.00	100	
2.16.2.1 6.2.21.0 .00.01.0 000.03. 2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraa n Pemerintah Daerah Kabupaten	Lapo ran	100	1	100	100	96.17	100	100	96.17	
2.16.2.1 6.2.21.0 .00.01.0 000.03. 2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Doku men	2	1	1.00	1.00	96.17	1.00	1.00	96.17	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Proram/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2026	Target Realisasi Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target Program /Kegiatan renja SKPD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program Keluaran Renstra SKPD Tahun 2023		Catatan
						Tar get	Realis asi	Ting kat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.21.2.1 6.2.21.0 .00.01.0 000.02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Cakupan Keamanan Bidang Persandian	%	22.93	100	22.93	22.47	97.99	100.00	100.00	100	
2.21.2.1 6.2.21.0 .00.01.0 000.02. 2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	1	4	5.00	5.00	100	8.00	0.00	100	
2.21.2.1 6.2.21.0 .00.01.0 000.02. 2.02.01	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi	Perangkat Daerah	5	20	5.00	5.00	100	8.00	8.00	100	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.2. selesai
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Maluku Tengah

NO	Indikator Sasaran	SPM/	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian				
		Standar Nasional	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Persentase tersedianya Pemenuhan Jaringan Daerah		67.30	22.86	48.57	74.29	100	63.46	22.86			
2	Tersedianya Sestim Layanan Informasi		27.40	59.62	73.08	86.54	100	26.92	59.62			
3	Terselenggaranya informasi publik Daerah		78.68	25.00	25	25	25	78.46	25.00			
4	Persentasi Desa Terakses Jaringan Telekomunikasi		55.20	85.00	87	90	95	43.67	86.98			
5	Indekx Keamanan Komunikasi dan Informasi		22.93	100	100	100	100	22.47	88.89			

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-Isu Strategis yang akan dihadapi antara lain:

1. **Satu Data untuk Pembangunan Kabupaten**

Untuk mendukung pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsinya, maka penentuan arah dan sasaran pembangunan daerah harus dilandasi oleh data dan informasi yang akurat. Untuk itu pengelolaan data dan informasi daerah harus difasilitasi secara terpadu dan terintegrasi dengan berbasiskan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

2. **Sistem Pemerintahan Berbasis Elektornik**

Layanan Pemerintah Daerah harus berbasis elektronik dengan system aplikasi (misalnya: perijinan, pendapatan daerah, pengiriman Jasa surat menyurat dll) secara bertahap akan dilayani berbasis TIK.

3. **Tuntutan Publik akan Keterbukaan Informasi dan Transparansi**

Pola pikir masyarakat yang semakin maju dan berkembang akan semakin menuntut berbagai informasi yang dibutuhkan. Masyarakat semakin kritis dan berani untuk menyampaikan pendapat, akan terus berupaya untuk mencari informasi yang relevan dengan situasi kondisi yang dihadapinya.

4. **Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi**

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), khususnya teknologi informasi yang pesat perlu direspon dan diantisipasi dengan berbagai program dan kegiatan yang bisa dimanfaatkan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat yang melanda berbagai wilayah dan komunitas masyarakat, termasuk juga kebutuhan masyarakat terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Bila tidak diantisipasi secara tepat tentu akan membawa eksese yang kurang baik bagi masyarakat

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel 2.4.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Kabupaten Maluku Tengah

Review terhadap Hasil Analisis Kebutuhan Rancangan Awal RKPD 2024							Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
KODE	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program(Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan(Output)	Satuan	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					5,214,964,000		5,214,964,000	
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase Peningkatan Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100.0	4,037,890,000	100.0	4,037,890,000	
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		2.0	27,400,000	2.0	27,400,000	
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Dan evaluasi	Dokumen	Kab.	2.0	27,400,000	2.0	27,400,000	
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Laporan	Kab.	2.0	3,185,964,000	2.0	3,185,964,000	
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	Kab.	40.0	2,714,964,000	40.0	2,714,964,000	
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	Kab.	1.0	471,000,000	1.0	471,000,000	
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.01.2.02.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan barang milik daerah	Dokumen		1.0	74,150,000	1.0	74,150,000	
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.01.2.02.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Kab.	1.0	74,150,000	1.0	74,150,000	
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.01.2.05.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen		1.0	10,000,000	1.0	10,000,000	
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.01.2.05.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	Kab.	1.0	10,000,000	1.0	10,000,000	
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	Laporan		5.0	445,003,000	5.0	445,003,000	
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Kab.	1.0	93,703,000	1.0	93,703,000	
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Kab.	1.0	24,250,000	1.0	24,250,000	
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Kab.	1.0	4,050,000	1.0	4,050,000	
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Kab.	1.0	23,000,000	1.0	23,000,000	
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Kab.	1.0	300,000,000	1.0	300,000,000	
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	Unit		40.00	52,833,000	40.00	52,833,000	
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Kab.	30.0	6,500,000	30.0	6,500,000	

Review terhadap Hasil Analisis Kebutuhan Rancangan Awal RKPD 2024							Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
KODE	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program(Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan(Output)	Satuan	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Kab.	3.0	46,333,000	3.0	46,333,000	
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Laporan		3.0	180,130,000	3.0	180,130,000	
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Kab.	1.0	2,400,000	1.0	2,400,000	
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Kab.	1.0	88,450,000	1.0	88,450,000	
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Kab.	1.0	89,280,000	1.0	89,280,000	
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	Unit		8.0	62,410,000	8.0	62,410,000	
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Kab.	2.0	47,000,000	2.0	47,000,000	
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Kab.	5.0	5,410,000	5.0	5,410,000	
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Kab.	1.0	10,000,000	1.0	10,000,000	
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.02	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Presentase Publikasi Informasi Melalui Media Online	%		25.00	129,464,000	25.00	129,464,000	
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab/Kota	Laporan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%			129,464,000		129,464,000	
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.02.2.01.04	Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	Dokumen	Kab.	5.0	20,000,000	5.0	20,000,000	
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.02.2.01.05	Pengelolaan media komunikasi publik	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Pengelolaan media komunikasi publik	Dokumen	Kab.	2.0	26,164,000	2.0	26,164,000	
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.02.2.01.07	Layanan hubungan media	Jumlah Layanan hubungan media	Layanan	Kab.	1.0	43,300,000	1.0	43,300,000	
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.02.2.01.12	Penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunikasi	Jumlah dokumen kemitraan dengan masyarakat media dan komunikasi dalam mendesiminasi informasi program dan kegiatan	Dokumen	Kab.	3.0	40,000,000	3.0	40,000,000	
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.03	Program Aplikasi Informatika	Presentase E-Government yang terintegrasi	%		69.55	987,410,000	69.55	987,410,000	
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan		36.0	911,730,000	36.0	911,730,000	
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.03.2.01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Domain	Kab.	34.0	21,000,000	34.0	21,000,000	
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.03.2.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Kab.	1.00	40,730,000	1.00	40,730,000	

Review terhadap Hasil Analisis Kebutuhan Rancangan Awal RKPD 2024							Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
KODE	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program(Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan(Output)	Satuan	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.03.2.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	Kab.	1.00	850,000,000	1.00	850,000,000	
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Laporan		2.0	75,680,000	2.0	75,680,000	
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Kab.	1.00	45,680,000	1.00	45,680,000	
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.03.2.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Perangkat Daerah	Kab.	1.00	30,000,000	1.00	30,000,000	
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								
2.21.2.16.2.21.0.00.01.0000.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Cakupan Keamanan Bidang Persandian	%		100.0	60,200,000	100.0	60,200,000	
2.21.2.16.2.21.0.00.01.0000.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan		1.00	10,200,000	1.00	10,200,000	
2.21.2.16.2.21.0.00.01.0000.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	Kab.	1.00	10,200,000	1.00	10,200,000	
2.21.2.16.2.21.0.00.01.0000.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Laporan		10.0	50,000,000	10.0	50,000,000	
2.21.2.16.2.21.0.00.01.0000.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Perangkat Daerah	Kab.	10.00	50,000,000	10.00	50,000,000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada Tahun 2024 tidak terdapat usulan dari masyarakat pada bidang urusan Komunikasi dan Informatika.

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Fokus Kebijakan Pembangunan Nasional pada Urusan Komunikasi dan Informatika tahun 2024 adalah mengembangkan infrastruktur telekomunikasi Tanah Air, sembari memperkuat ekosistem digital” dimana Infrastruktur telekomunikasi yang mumpuni menjadi tulang punggung menciptakan ekosistem digital yang mapan, selain itu pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Ini merupakan hal penting agar bisa sejalan dengan pengembangan teknologinya.

Adapun program prioritas yang akan diselenggarakan antara lain; Infrastruktur (Palapa Ring, Last Mile, 2.700 titik akses internet), Pembangunan ekosistem digital, Literasi digital dan pengendalian konten, Layanan publik dan goverment public relations, Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Teknologi.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam kerangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mewujudkan Tujuan RKPD Kabupaten Maluku Tengah 2023-2026 dan sebagai penjabaran renstra dinas Komunikasi dan Informatika maka pada tahun 2024, maka rencana kerja Dinas Kominikasi dan informatika menetapkan tujuan 1. Meningkatnya Sistim Jaringan Informasi, Komunikasi, dan Layanan Publik yang terintegrasi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, efektif, Bersih dan Transparan sebagai ukuran keberhasilannya adalah Cakupan Infrastruktur dan Layanan Publik yang terintegrasi dengan sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Informasi dan komunikasi Publik serta Persandian Keamanan Informasi dan Komunikasi Daerah dan ukuran keberhasilannya dapat diukur dengan indikator .Persentase tersedianya Pemenuhan Jaringan Daerah di targetkan mencapai 48,57%, Tersedianya Sistim Layanan Informasi ditargetkan mencapai 73,08%, Terselenggaranya informasi publik Daerah ditargetkan mencapai 25,00%, Persentasi Desa Terakses Jaringan Telekomunikasi ditargetkan mencapai 87,00%, dan Indekx Keamanan Komunikasi dan Informasi 100%, selain itu pula dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih maka

pada tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan tujuan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, efektif, Bersih dan Transparan dengan indikator keberhasilan predikat Sakip dengan nilai A.

3.3. Program dan Kegiatan

Penjelasan rumusan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika dapat disajikan pada Tabel 3.3, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan
Dinas Komunikasi dan Informatika
Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Maluku Tengah

Review terhadap Hasil Analisis Kebutuhan Rancangan Awal RKPD 2024							Catatan Penting	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
Kode	Proram/ Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Lokasi	Target	Pagu Indikatif			Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					5,214,964,000				15,552,000,000
2.16.2.16.2.2 1.0.00.01.00 00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/KABUPATEN	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah			90.0	4,037,890,000			114.0	6,927,000,000
2.16.2.16.2.2 1.0.00.01.00 00.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		2.0	27,400,000			4.0	150,000,000
2.16.2.16.2.2 1.0.00.01.000 0.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Dan evaluasi	Dokumen	Kab.	2.0	27,400,000		DAU	2.0	75,000,000
2.16.2.16.2.2 1.0.00.01.000 0.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Kab.	0.0	-		DAU	2.0	75,000,000
2.16.2.16.2.2 1.0.00.01.00 00.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Laporan	Kab.	41.0	3,185,964,000		DAU	41.0	3,700,000,000
2.16.2.16.2.2 1.0.00.01.000 0.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang		40.0	2,714,964,000			40.0	3,000,000,000
2.16.2.16.2.2 1.0.00.01.000 0.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	Kab.	1.0	471,000,000		DAU	1.0	700,000,000
2.16.2.16.2.2 1.0.00.01.00 00.01.2.02.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan barang milik daerah	Dokumen	Kab.	1.0	74,150,000		DAU	1.0	150,000,000
2.16.2.16.2.2 1.0.00.01.000 0.01.2.02.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		1.0	74,150,000			1.0	150,000,000
2.16.2.16.2.2 1.0.00.01.00 00.01.2.05.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	Kab.	1.0	10,000,000		DAU	16.0	590,000,000
2.16.2.16.2.2 1.0.00.01.000 0.01.2.05.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	Kab.	0.0	-		DAU	1.0	100,000,000
2.16.2.16.2.2 1.0.00.01.000 0.01.2.05.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Kab.	0.0	-		DAU	1.0	100,000,000
2.16.2.16.2.2 1.0.00.01.000 0.01.2.05.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen		1.0	10,000,000		DAU	1.0	50,000,000

Review terhadap Hasil Analisis Kebutuhan Rancangan Awal RKPD 2024							Catatan Penting	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
Kode	Proram/ Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Lokasi	Target	Pagu Indikatif			Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.16.2.16.2.2 1.0.00.01.000 0.01.2.05.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	Kab.	0.0	-		DAU	1.0	50,000,000
2.16.2.16.2.2 1.0.00.01.000 0.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	Kab.	0.0	-		DAU	1.0	25,000,000
2.16.2.16.2.2 1.0.00.01.000 0.01.2.05.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Kab.	0.0	-		DAU	5.0	150,000,000
2.16.2.16.2.2 1.0.00.01.000 0.01.2.05.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Kab.	0.0	-		DAU	1.0	15,000,000
2.16.2.16.2.2 1.0.00.01.000 0.01.2.05.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Kab.	0.0	-		DAU	5.0	100,000,000
2.16.2.16.2.2 1.0.00.01.00 00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	Laporan		5.0	445,003,000			6.0	1,045,000,000
2.16.2.16.2.2 1.0.00.01.000 0.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Kab.	1.0	93,703,000		DAU	1.0	250,000,000
2.16.2.16.2.2 1.0.00.01.000 0.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Kab.	0.0	-		DAU	1.0	25,000,000
2.16.2.16.2.2 1.0.00.01.000 0.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		1.0	24,250,000		DAU	1.0	100,000,000
2.16.2.16.2.2 1.0.00.01.000 0.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Kab.	1.0	4,050,000		DAU	1.0	20,000,000
2.16.2.16.2.2 1.0.00.01.000 0.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	Kab.	1.0	23,000,000		DAU	1.0	50,000,000
2.16.2.16.2.2 1.0.00.01.000 0.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Kab.	1.0	300,000,000		DAU	1.0	600,000,000
2.16.2.16.2.2 1.0.00.01.00 00.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	Unit		33.0	52,833,000			39.0	850,000,000
2.16.2.16.2.2 1.0.00.01.000 0.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	Kab.	0.0	-		DAU	5.0	200,000,000
2.16.2.16.2.2 1.0.00.01.000 0.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	Kab.	0.0	-		Dau	0.0	500,000,000
2.16.2.16.2.2 1.0.00.01.000 0.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Kab.	30.0	6,500,000		Dau	30.0	0.00
2.16.2.16.2.2 1.0.00.01.000 0.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Kab.	3.0	46,333,000		DAU	3.0	100,000,000
2.16.2.16.2.2 1.0.00.01.000 0.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Kab.	0.0	-		DAU	1.0	50,000,000
2.16.2.16.2.2 1.0.00.01.00 00.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Laporan	Kab.	3.0	180,130,000		DAU	3.0	187,000,000
2.16.2.16.2.2 1.0.00.01.000 0.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Kab.	1.0	2,400,000		DAU	1.0	10,000,000
2.16.2.16.2.2 1.0.00.01.000 0.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Kab.	1.0	88,450,000		DAU	1.0	92,000,000

Review terhadap Hasil Analisis Kebutuhan Rancangan Awal RKPD 2024							Catatan Penting	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
Kode	Proram/ Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Lokasi	Target	Pagu Indikatif			Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.16.2.16.2.2 1.0.00.01.000 0.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Kab.	1.0	89,280,000		DAU	1.0	85,000,000
2.16.2.16.2.2 1.0.00.01.00 00.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	Unit	Kab.	4.0	62,410,000		DAU	4.0	255,000,000
2.16.2.16.2.2 1.0.00.01.000 0.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Kab.	2.0	47,000,000		DAU	2.0	125,000,000
2.16.2.16.2.2 1.0.00.01.000 0.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Kab.	1.0	5,410,000		DAU	1.0	30,000,000
2.16.2.16.2.2 1.0.00.01.000 0.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		1.0	10,000,000		DAU	1.0	100,000,000
2.16.2.16.2.2 1.0.00.01.00 00.02	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Presentase Publikasi Informasi Melalui Media Online				129,464,000				2,950,000,000
2.16.2.16.2.2 1.0.00.01.00 00.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab/Kota	Laporan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				129,464,000				2,950,000,000
2.16.2.16.2.2 1.0.00.01.000 0.02.2.01.01	Perumusan kebijakan teknis bidangn IKP	Jumlah dokumen hasil perumusan kebijakan teknis bidangn IKP	Dokumen		0.0	-		DAU	1.0	100,000,000
2.16.2.16.2.2 1.0.00.01.000 0.02.2.01.02	Monitoring opini dan aspirasi publik	Jumlah dokumen hasil monitoring opini dan aspirasi publik	Dokumen		0.0	-		DAU	1.0	100,000,000
2.16.2.16.2.2 1.0.00.01.000 0.02.2.01.03	Monitoring Informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi PD	Jumlah dokumen hasil monitoring Informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi PD	Dokumen		0.0	-		DAU	1.0	100,000,000
2.16.2.16.2.2 1.0.00.01.000 0.02.2.01.04	Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	Dokumen		5.0	20,000,000		DAU	5.0	500,000,000
2.16.2.16.2.2 1.0.00.01.000 0.02.2.01.05	Pengelolaan media komunikasi publik	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Pengelolaan media komunikasi publik	Dokumen		2.0	26,164,000		DAU	2.0	200,000,000
2.16.2.16.2.2 1.0.00.01.000 0.02.2.01.06	Pelayanan informasi publik	Jumlah dokumen hasil Pelayanan informasi publik	Dokumen		0.0	-		DAU	1.0	100,000,000
2.16.2.16.2.2 1.0.00.01.000 0.02.2.01.07	Layanan hubungan media	Jumlah Layanan hubungan media	Layanan		1.0	43,300,000		DAU	1.0	300,000,000
2.16.2.16.2.2 1.0.00.01.000 0.02.2.01.08	Kemitraan dengan pemangku kepentingan	Jumlah dokumenKemitraan dengan pemangku kepentingan	Dokumen		0.0	-		DAU	5.0	300,000,000
2.16.2.16.2.2 1.0.00.01.000 0.02.2.01.09	Manajemen komunikasi krisis	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Manajemen komunikasi krisis	Dokumen		0.0	-		DAU	1.0	100,000,000
2.16.2.16.2.2 1.0.00.01.000 0.02.2.01.10	Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik	Jumlah dokumen hasil Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik	Dokumen		0.0	-		DAU	5.0	150,000,000
2.16.2.16.2.2 1.0.00.01.000 0.02.2.01.11	Penguatan tata kelola komisi informasi di daerah	umlah dokumen hasil Penguatan tata kelola komisi informasi di daerah	Dokumen		0.0	-		DAU	1.0	100,000,000
2.16.2.16.2.2 1.0.00.01.000 0.02.2.01.12	Penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunikasi	Jumlah dokumen kemitraan dengan masyarakat media dan komunikasi dalam mendesiminasi informasi program dan kegiatan	Dokumen		3.0	40,000,000		DAU	3.0	600,000,000

Review terhadap Hasil Analisis Kebutuhan Rancangan Awal RKPD 2024							Catatan Penting	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
Kode	Proram/ Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Lokasi	Target	Pagu Indikatif			Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.16.2.16.2.2 1.0.00.01.000 0.02.2.01.13	Penyediaan/pengadaan sarana dana prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik PD kab/kota	Jumlah sarana dana prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik PD kab/kota	Dokumen		0.0	-		DAU	4.0	300,000,000
2.16.2.16.2.2 1.0.00.01.00 00.03	Program Aplikasi Informatika	Presentase E-Government yang terintegrasi			38.0	987,410,000			48.0	5,225,000,000
2.16.2.16.2.2 1.0.00.01.00 00.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			36.0	911,730,000			36.0	2,225,000,000
2.16.2.16.2.2 1.0.00.01.000 0.03.2.01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Domain		34.0	21,000,000		DAU	34.0	50,000,000
2.16.2.16.2.2 1.0.00.01.000 0.03.2.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		1.00	40,730,000		DAU	1.00	75,000,000
2.16.2.16.2.2 1.0.00.01.000 0.03.2.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit		1.00	850,000,000		DAU	1.00	2,100,000,000
2.16.2.16.2.2 1.0.00.01.00 00.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten			2.0	75,680,000			12.0	3,000,000,000
2.16.2.16.2.2 1.0.00.01.000 0.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E - Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		1.00	45,680,000		DAU	1.00	100,000,000
2.16.2.16.2.2 1.0.00.01.000 0.03.2.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dokumen		0.0	-		DAU	1.00	600,000,000
2.16.2.16.2.2 1.0.00.01.000 0.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit		0.0	-		DAU	1.00	300,000,000
2.16.2.16.2.2 1.0.00.01.000 0.03.2.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Dokumen		0.0	-		DAU	1.00	300,000,000
2.16.2.16.2.2 1.0.00.01.000 0.03.2.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Dokumen		1.00	30,000,000		DAU	1.00	100,000,000
2.16.2.16.2.2 1.0.00.01.000 0.03.2.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Perangkat Daerah		0.0	-		DAU	1.00	100,000,000
2.16.2.16.2.2 1.0.00.01.000 0.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit		0.0	-		DAU	1.00	200,000,000
2.16.2.16.2.2 1.0.00.01.000 0.03.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Layanan		0.0	-		DAU	1.00	200,000,000
2.16.2.16.2.2 1.0.00.01.000 0.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Dokumen		0.0	-		DAU	1.00	500,000,000

Review terhadap Hasil Analisis Kebutuhan Rancangan Awal RKPD 2024							Catatan Penting	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
Kode	Proram/ Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Lokasi	Target	Pagu Indikatif			Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.16.2.16.2.2 1.0.00.01.000 0.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan omunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen		0.0	-		DAU	1.00	250,000,000
2.16.2.16.2.2 1.0.00.01.000 0.03.2.02.11	Pengelolaan <i>Government Chief Information Officer (GCIO)</i>	Jumlah Dokumen Pengelolaan <i>Government Chief Information Officer (GCIO)</i>	Dokumen		0.0	-		DAU	1.00	250,000,000
2.16.2.16.2.2 1.0.00.01.000 0.03.2.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Dokumen		0.0	-		DAU	1.00	100,000,000
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					70,400,000				550,000,000
2.21.2.16.2.2 1.0.00.01.00 00.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Cakupan Keamanan Bidang Persandian		-	26.0	60,200,000			31.0	450,000,000
2.21.2.16.2.2 1.0.00.01.00 00.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			16.00	10,200,000			21.00	350,000,000
2.21.2.16.2.2 1.0.00.01.000 0.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Dokumen		0.0	-		DAU	1.00	50,000,000
2.21.2.16.2.2 1.0.00.01.000 0.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan		0.0	-		DAU	1.00	100,000,000
2.21.2.16.2.2 1.0.00.01.000 0.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan		0.0	-		DAU	1.00	100,000,000
2.21.2.16.2.2 1.0.00.01.000 0.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah		16.00	10,200,000		DAU	18.00	100,000,000
2.21.2.16.2.2 1.0.00.01.00 00.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	Laporan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota			10.0	50,000,000			10.0	100,000,000
2.21.2.16.2.2 1.0.00.01.000 0.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Perangkat Daerah		10.00	50,000,000		DAU	10.00	100,000,000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah pada tahun 2024 mempunyai 4 program, 13 kegiatan dan 29 sub kegiatan. Program yang mendukung dalam pencapaian sasaran ada 3 program sedangkan 1 program sebagai pendukung yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Sedangkan program yang mendukung capaian sasaran ada 3 yaitu Program Informasi dan Komunikasi Publik, Program Aplikasi Informatika, dan Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi. Usulan pendanaan program kegiatan pada tahun 2024 sebesar Rp. 5.214.964.000,00.-

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan
Dinas Komunikasi dan Informatika
Perangkat Daerah Tahun 2024
Kabupaten Maluku Tengah

Rancangan Awal RKPD 2024							Sumber Dana
KODE	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program(Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan(Output)	Satuan	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					5,214,964,000	
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase Peningkatan Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100.0	4,037,890,000	
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja erangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		2.0	27,400,000	
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Dan evaluasi	Dokumen	Kab.	2.0	27,400,000	DAU
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Laporan	Kab.	2.0	3,185,964,000	
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	Kab.	40.0	2,714,964,000	DAU
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	Kab.	1.0	471,000,000	DAU
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.01.2.02.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan barang milik daerah	Dokumen		1.0	74,150,000	
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.01.2.02.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Kab.	1.0	74,150,000	DAU
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.01.2.05.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen		1.0	10,000,000	

Rancangan Awal RKPD 2024							Sumber Dana
KODE	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program(Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan(Output)	Satuan	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.01.2.05.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	Kab.	1.0	10,000,000	DAU
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	Laporan		5.0	445,003,000	
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Kab.	1.0	93,703,000	DAU
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Kab.	1.0	24,250,000	DAU
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Kab.	1.0	4,050,000	DAU
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	Kab.	1.0	23,000,000	DAU
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Kab.	1.0	300,000,000	DAU
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	Unit		40.00	52,833,000	
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Kab.	30.0	6,500,000	DAU
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Kab.	3.0	46,333,000	DAU
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Laporan		3.0	180,130,000	
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Kab.	1.0	2,400,000	DAU
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Kab.	1.0	88,450,000	DAU
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Kab.	1.0	89,280,000	DAU
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	Unit		8.0	62,410,000	
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Kab.	2.0	47,000,000	DAU
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Kab.	5.0	5,410,000	DAU
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Kab.	1.0	10,000,000	DAU
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.02	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Presentase Publikasi Informasi Melalui Media Online	%			129,464,000	
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab/Kota	Laporan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			11	129,464,000	
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.02.2.01.04	Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi public	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	Dokumen	Kab.	5.0	20,000,000	DAU

Rancangan Awal RKPD 2024							Sumber Dana
KODE	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program(Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan(Output)	Satuan	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.02.2.01.05	Pengelolaan media komunikasi public	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Pengelolaan media komunikasi publik	Dokumen	Kab.	2.0	26,164,000	DAU
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.02.2.01.07	Layanan hubungan media	Jumlah Layanan hubungan media	Layanan	Kab.	1.0	43,300,000	DAU
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.02.2.01.12	Penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunikasi	Jumlah dokumen kemitraan dengan masyarakat media dan komunikasi dalam mendesimisasi informasi program dan kegiatan	Dokumen	Kab.	3.0	40,000,000	DAU
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.03	Program Aplikasi Informatika	Presentase E-Government yang terintegrasi	%		69.55	987,410,000	
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan		36.0	911,730,000	
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.03.2.01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Domain	Kab.	34.0	21,000,000	DAU
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.03.2.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Kab.	1.00	40,730,000	DAU
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.03.2.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	Kab.	1.00	850,000,000	DAU
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten	Laporan		2.0	75,680,000	
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Kab.	1.00	45,680,000	DAU
2.16.2.16.2.21.0.00.01.0000.03.2.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Perangkat Daerah	Kab.	1.00	30,000,000	DAU
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						
2.21.2.16.2.21.0.00.01.0000.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Cakupan Keamanan Bidang Persandian	%		100.0	60,200,000	
2.21.2.16.2.21.0.00.01.0000.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan		1.00	10,200,000	
2.21.2.16.2.21.0.00.01.0000.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	Kab.	1.00	10,200,000	DAU
2.21.2.16.2.21.0.00.01.0000.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Laporan		10.0	50,000,000	
2.21.2.16.2.21.0.00.01.0000.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Perangkat Daerah	Kab.	10.00	50,000,000	DAU

BAB V. PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) yang berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024 Kabupaten Maluku Tengah.

Dokumen ini juga menjadi acuan di dalam penyusunan rencana pencapaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika didalam mewujudkan Tujuan Rencana Kerja Pembangunan Kepala daerah sebagaimana termuat didalam dokumen RKPD Kabupaten Maluku Tengah 2023-2026, dan menjadi pedoman bagi seluruh Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2024.

Dokumen Renja Perangkat Daerah ini memiliki kedudukan yang vital dalam pengembangan perencanaan, koordinasi dan pengendalian pembangunan selama 1 (satu) tahun, memberikan arah, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, serta program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah.

Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah senantiasa dilakukan pengendalian dan evaluasi sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Bupati Maluku Tengah, serta secara moral dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Kabupaten Maluku Tengah.